

Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Mojokerto

Nur Ainiyah¹, Agoes Hadi Poernomo²

E-mail: nurainiyah0202@gmail.com¹

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit

Abstract

This Research is motivated to conduct development research in order to find out the effectiveness of land and building tax collection before the pandemic and during a pandemic. This research uses a qualitative research paradigm. The qualitative research paradigm is usually associated with qualitative research that is descriptive analytical, comparative in nature, focuses on meaning, and data where the data can be obtained by observing and/or document analysis. The research approach used is phenomenology by collecting data using interviews and Documents related to land and building tax. The results of this study indicate that land and building tax payments in Mojokerto Regency can be made online or offline. Land and building tax collection in Mojokerto Regency is collected directly by officials from the Mojokerto Regency regional revenue agency and to this day still involves village government officials. During the period before the pandemic, the effectiveness of land and building tax collection in Mojokerto Regency was in the criteria of being quite effective (2018 and 2019) while during the pandemic it was less effective (2020-2022). This was due to changes in the achievement targets which were also accompanied by a decrease in the realization of land and building tax revenues.

Keywords: Effectiveness, Land and Building Tax.

Abstrak

Penelitian termotivasi untuk melakukan penelitian pengembangan agar dapat mengetahui efektifitas pemungutan pajak atas bumi dan juga bangunan sebelum masa pandemi dan pada saat pandemidemi Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif biasanya dikaitkan dengan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, bersifat komparatif, menitikberatkan pada makna, dan data yang yang mana data tersebut bisa diperoleh dengan jalan melakukan observasi dan/atau analisis dokumen Pendekatan penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dengan pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumen terkait pajak atas bumi dan juga bangunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pembayaran pajak atas bumi dan juga bangunan Kabupaten Mojokerto dapat dilakukan secara online maupun offline. Pemungutan pajak atas bumi dan juga bangunan di Kabupaten Mojokerto dipungut langsung oleh petugas dari badan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto dan sampai saat ini masih melibatkan aparatur pemerintahan desa. Pada masa sebelum pandemi efektifitas pemungutan pajak atas bumi dan juga bangunan di Kabupaten Mojokerto dalam kriteria cukup efektif (tahun 2018 dan 2019) sedangkan pada masa pandemi kurang efektif (tahun 2020-2022). Hal ini disebabkan adanya perubahan target capaian yang dibarengi pula dengan penurunan realisasi penerimaan pajak atas bumi dan juga bangunan.

Kata kunci: Efektifitas, Pajak Bumi dan Bangunan.

PENDAHULUAN

Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, pajak merupakan sumber pendapatan yang berkontribusi langsung terhadap penerimaan. Dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah khususnya pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pendapatan yang diperoleh melalui pajak seringkali mengalami kontraksi maupun ekspansi mengikuti kondisi perekonomian baik global, regional maupun lokal. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia tak terkecualikan telah membawa dampak tersendiri terhadap penghasilan negara dari sektor pajak. pandemi Covid-19 secara nyata berdampak pada realisasi penerimaan pajak karena keadaan perekonomian dunia sedang mati suri.

Tabel 1. Realisasi Pajak

No	Periode/Tahun	Realisasi Pajak	Keterangan
1	2020	Rp 1.070 triliun	Penurunan 19,7%. Dibanding tahun 2019
2	Januari-Maret 2020	Rp 241,61 triliun	Penurunan 5%. Dibanding tahun 2019
3	April 2020	Rp 376,7 triliun	Penurunan 3,1%. Dibanding tahun 2019
4	Mei 2020	Rp 444,6 triliun	Penurunan 3,1%. Dibanding tahun 2019

Sumber: cnbc Indonesia (2021)

CNBC Indonesia mengabarkan bahwa:

“Realisasi penerimaan pajak sampai akhir Juni 2020 senilai Rp 531,7 triliun atau 44,4% terhadap sasaran APBN 2020 senilai Rp1.198,8 triliun. Data Kementerian Keuangan pada semester 1 tahun 2020 penerimaan pajak mencapai Rp 531,8 triliun (terkoreksi 12% year on year) pada periode tahun lalu sebanyak Rp 604,3 triliun. Pada Januari-April 2021 penerimaan pajak sudah mencapai Rp 374,9 triliun atau 30,94% terhadap sasaran APBN senilai Rp1.229,6 triliun atau mengalami kontraksi 0,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bulan Mei 2021, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan positif 3,4% Jika dibandingkan menggunakan periode yang sama tahun sebelumnya”.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi benar-benar berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak secara umum di Indonesia. Pandemi secara nyata berdampak pada kurang efektifnya pemungutan pajak di Indonesia. Tetapi, hal ini tidak berlaku terhadap pemungutan pajak atas bumi dan juga bangunan. Penelitiannya Ramadhan (2021) membuktikan bahwa realisasi atau penerimaan pemungutan pajak atas bumi dan juga bangunan cukup efektif meskipun realisasinya tidak terpenuhi. Demikian halnya penelitian yang dilakukan Wardani dan Estiningrum (2022). Penelitian mereka menunjukkan hasil bahwa “Efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Trenggalek sepanjang tahun 2017-2021 dinilai sangat efektif karena realisasi pemungutan mengalami peningkatan di setiap tahunnya melebihi target yang telah ditetapkan”.

Bermula dari data dan hasil penelitian yang diperoleh, penelitian termotivasi untuk melakukan penelitian pengembangan agar dapat mengetahui efektifitas pemungutan pajak atas bumi dan juga bangunan sebelum masa pandemi dan pada saat pandemi. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan strategi pemungutan pajak atas bumi dan juga bangunan khususnya pada masa setelah pandemi agar lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mendongkrak pendapatan daerah agar pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terlaksana dengan baik dan optimal.

RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang dikaji adalah bagaimanakah efektifitas pemungutan pajak atas bumi dan juga bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Mojokerto sebelum pandemi dan pada saat pandemi?

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Siagian (2001 : 24) menurutnya bahwa kata efektifitas dapat digunakan ketika penggunaan sumber daya yang tersedia dapat jauh lebih sedikit dari rencana semula, yang berarti manfaat yang dicita-citakan atas pemanfaatan sumber daya dan fasilitas lainnya dapat tercapai, walaupun sumber daya yang digunakan relatif lebih sedikit dari yang direncanakan sehingga dapat disimpulkan tentang adanya efektifitas. Efektifitas diartikan sebagai seberapa jauh suatu organisasi telah berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan awalnya (Safitri et al., 2022).

Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Sebelum tahun 2014 , pajak atas bumi dan juga bangunan termasuk golongan pajak pusat, namun sesuai dengan pengesahan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 terjadi perubahan, dimana negara tidak lagi menguasai/menangani pajak atas bumi dan juga bangunan, melainkan ditangani atau menjadi otoritas kota/pemerintah daerah. Samudra (2016:260) menjelaskan bahwa pajak atas bumi dan juga bangunan adalah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah yang pendapatannya dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Sedangkan Fungsi pajak menurut Priantara (2012) adalah: 1) Fungsi budgetair (pembiayaan), fungsi ini merupakan fungsi utama pajak dimana pajak digunakan sebagai sarana untuk memperoleh pendanaan/pendapatan secara optimal ke bendahara (Kas Negara) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 2) Fungsi regulierend (pengaturan), yang disebut juga fungsi tambahan, yaitu pembayaran digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan.

Priantara (2012) mengemukakan tiga asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas Tempat atau Domisili, asas ini menyatakan bahwa pemerintah berhak memungut pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili. atau pendapatan yang diterima di wilayahnya dari negara tempat tinggal atau luar negeri.
2. Asas sumber, asas ini menyatakan bahwa negara berhak untuk memungut pajak penghasilan yang berasal atau timbul dari wilayahnya, tanpa memandang tempat kediaman wajib pajak, baik di dalam maupun di luar wilayah negara.

3. Asas Kebangsaan, asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak berkaitan dengan kewarganegaraan atau kewarganegaraan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif biasanya dikaitkan dengan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, bersifat komparatif, menitikberatkan pada makna, dan data yang mana data tersebut bisa diperoleh dengan jalan melakukan observasi dan/atau analisis dokumen. (Moleong :2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dengan pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumen terkait pajak atas bumi dan juga bangunan.

Efektivitas dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan dikonversikan dengan kriteria sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900.327 Tahun 1996 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektifitas

No.	Prosentase	Kriteria
1	100% <	Sangat Efektif
2	90% - 100%	Efektif
3	80% - 90%	Cukup Efektif
4	60% - 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Informasi yang diperoleh dari informan yang merupakan petugas pemungut pajak atas bumi dan juga bangunan dari badan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto bahwa Pembayaran pajak atas bumi dan juga bangunan Kabupaten Mojokerto dapat dilakukan secara online maupun offline. Pemungutan pajak atas bumi dan juga bangunan di Kabupaten Mojokerto dipungut langsung oleh petugas dari badan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto dan sampai saat ini masih melibatkan aparatur pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa khususnya kepala kewilayahan desa ditugaskan sebagai pemungut *door-to-door*. Aparatur desa diberi tugas memungut pajak atas bumi dan juga bangunan pedesaan yang ada diwilayahnya. Bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran, maka data mereka akan diinput melalui aplikasi SIPANJOL, setelah itu uang yang diterima kepala kewilayahan akan diserahkan kepada petugas dari badan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto. Setoran tersebut akan disetorkan ke kas Kabupaten Mojokerto melalui Bank JATIM oleh petugas tersebut. Selanjutnya petugas menerbitkan surat tanda setoran yang digunakan sebagai bukti pembayaran yang sah dan diberikan kepada wajib pajak melalui aparatur desa. Aparatur desa yang terlibat akan mendapatkan honorarium sebagai petugas pengkoleksi pajak sebesar Rp. 2000 atas Nomor obyek pajak yang berhasil ditagihnya, baik itu pembayaran melalui online/offline.

Dikutip dari TEMPO.CO bahwa Pandemi Covid-19 melanda Indonesia terhitung sejak 2 Maret 2020, oleh karena itu data yang digunakan peneliti adalah data Target dan Realisasi pajak atas bumi dan juga bangunan Kabupaten Mojokerto

tahun 2018 dan 2019, sedangkan pada masa pandemi menggunakan data tahun 2020, 2021 dan 2022. Data tersaji sebagaimana gambar dan tabel berikut:

PERIODE PEMBAYARAN : 1-1-2018 Sampai 31-12-2018

NO	KECAMATAN	BAKU AWAL	PERUBAHAN	BAKU AKHIR	REALISASI PERIODE INI			REALISASI S/D PERIODE INI		
					POKOK	SANKSI	TOTAL	POKOK	SANKSI	TOTAL
1	MOJOSARI	3.816,585,399	-111,139,663	3.705,445,736	3.472,873,327	32,989,792	3.505,863,119	3.472,873,327	32,989,792	3.505,863,119
2	KEMLAGI	2.488,544,271	-43,748,761	2.444,795,510	2.260,231,579	35,976,859	2.296,208,438	2.260,231,579	35,976,859	2.296,208,438
3	PUNGGING	3.724,353,509	-132,102,962	3.592,250,547	3.249,044,288	27,527,484	3.276,571,772	3.249,044,288	27,527,484	3.276,571,772
4	MOJOANYAR	2.184,618,938	-81,031,994	2.103,586,944	1,875,438,895	11,676,293	1,887,115,188	1,875,438,895	11,676,293	1,887,115,188
5	NGORO	3.702,514,768	-189,177,303	3.513,337,465	3,086,778,990	29,192,963	3,115,971,953	3,086,778,990	29,192,963	3,115,971,953
6	BANGSAL	2.094,764,592	-83,258,969	2,011,505,623	1,766,583,088	18,194,144	1,784,777,232	1,766,583,088	18,194,144	1,784,777,232
7	GEDEG	1.967,442,764	-49,320,934	1,918,121,830	1,684,362,740	19,975,164	1,704,337,904	1,684,362,740	19,975,164	1,704,337,904
8	JETIS	3.635,899,107	-126,832,251	3,509,066,856	3,016,496,166	20,916,905	3,037,413,071	3,016,496,166	20,916,905	3,037,413,071
9	GONDANG	1.662,357,376	-29,187,470	1,633,169,906	1,403,699,016	16,606,072	1,420,305,088	1,403,699,016	16,606,072	1,420,305,088
10	DLANGGU	2.533,690,708	-147,852,296	2,385,838,412	2,038,440,757	24,451,771	2,062,892,528	2,038,440,757	24,451,771	2,062,892,528
11	TRAWAS	2.651,488,345	-206,050,956	2,445,437,389	2,083,295,979	10,653,109	2,093,949,088	2,083,295,979	10,653,109	2,093,949,088
12	DAWARBLANDONG	2.655,159,455	-211,045,368	2,444,114,087	2,070,729,843	20,130,339	2,090,860,182	2,070,729,843	20,130,339	2,090,860,182
13	PACET	2.787,031,203	-124,792,876	2,662,238,327	2,249,782,751	22,057,160	2,271,839,911	2,249,782,751	22,057,160	2,271,839,911
14	KUTOREJO	1.904,865,910	-33,694,195	1,871,171,715	1,531,714,891	18,517,764	1,550,232,655	1,531,714,891	18,517,764	1,550,232,655
15	JATIREJO	1.905,246,525	-152,732,070	1,752,514,455	1,422,854,197	18,593,826	1,441,448,023	1,422,854,197	18,593,826	1,441,448,023
16	PURI	3.619,082,655	-267,288,347	3,351,794,308	2,686,590,215	22,938,988	2,709,529,203	2,686,590,215	22,938,988	2,709,529,203
17	SOOKO	3.386,534,223	-241,798,949	3,144,735,274	2,475,017,184	12,549,057	2,487,566,241	2,475,017,184	12,549,057	2,487,566,241
18	TROWULAN	3.551,101,579	-181,479,877	3,369,621,702	2,469,427,295	28,616,378	2,498,043,673	2,469,427,295	28,616,378	2,498,043,673
	TOTAL	50,271,281,327	-2,412,535,241	47,858,746,086	40,843,361,201	391,564,068	41,234,925,269	40,843,361,201	391,564,068	41,234,925,269

Gambar 1. Foto Data Penetapan Target dan Penerimaan/Realisasi PBB Tahun 2018

PERIODE PEMBAYARAN : 1-1-2019 Sampai 31-12-2019

NO	KECAMATAN	BAKU AWAL	PERUBAHAN	BAKU AKHIR	REALISASI PERIODE INI			REALISASI S/D PERIODE INI		
					POKOK	SANKSI	TOTAL	POKOK	SANKSI	TOTAL
1	BANGSAL	2.090,773,845	-46,318,760	2,044,455,085	1,885,141,648	18,679,753	1,903,821,401	1,885,141,648	18,679,753	1,903,821,401
2	MOJOSARI	3.851,693,576	-122,656,123	3,729,037,453	3,385,087,967	28,633,608	3,413,721,575	3,385,087,967	28,633,608	3,413,721,575
3	GEDEG	1.962,385,140	-49,748,924	1,912,636,216	1,722,626,743	17,977,342	1,740,604,085	1,722,626,743	17,977,342	1,740,604,085
4	GONDANG	1.656,079,472	-149,852,739	1,506,226,733	1,305,907,423	7,712,300	1,313,619,723	1,305,907,423	7,712,300	1,313,619,723
5	KEMLAGI	2.493,384,362	-95,448,003	2,397,936,359	2,076,838,752	29,884,750	2,106,723,502	2,076,838,752	29,884,750	2,106,723,502
6	PUNGGING	3.712,866,590	-172,081,241	3,540,785,349	3,059,604,745	19,165,663	3,078,770,408	3,059,604,745	19,165,663	3,078,770,408
7	MOJOANYAR	2.189,041,789	-102,373,166	2,086,668,623	1,775,306,999	12,292,172	1,787,599,171	1,775,306,999	12,292,172	1,787,599,171
8	DLANGGU	2.532,018,379	-178,863,628	2,353,154,751	1,982,017,883	22,626,011	2,004,643,894	1,982,017,883	22,626,011	2,004,643,894
9	TRAWAS	2.647,433,209	-200,403,039	2,447,030,170	2,014,756,626	8,739,229	2,023,495,855	2,014,756,626	8,739,229	2,023,495,855
10	KUTOREJO	2.212,715,557	-261,816,687	1,950,898,870	1,602,811,384	17,220,506	1,620,031,890	1,602,811,384	17,220,506	1,620,031,890
11	JETIS	3.635,243,176	-216,282,261	3,418,960,915	2,782,393,050	19,057,442	2,801,450,492	2,782,393,050	19,057,442	2,801,450,492
12	JATIREJO	1.901,794,789	-136,455,779	1,765,339,010	1,434,682,725	17,444,003	1,452,126,728	1,434,682,725	17,444,003	1,452,126,728
13	NGORO	3.696,439,839	-229,910,572	3,466,529,267	2,801,136,457	20,857,242	2,821,993,699	2,801,136,457	20,857,242	2,821,993,699
14	SOOKO	3.417,537,003	-197,603,777	3,219,933,226	2,583,208,897	17,117,290	2,600,326,187	2,583,208,897	17,117,290	2,600,326,187
15	PACET	2.849,145,039	-203,359,343	2,645,785,696	2,074,464,727	16,502,434	2,090,967,161	2,074,464,727	16,502,434	2,090,967,161
16	PURI	3.651,942,635	-255,747,936	3,396,194,699	2,652,611,564	14,260,300	2,666,871,864	2,652,611,564	14,260,300	2,666,871,864
17	DAWARBLANDONG	2.655,249,671	-236,248,173	2,419,001,498	1,858,067,565	18,333,245	1,876,400,810	1,858,067,565	18,333,245	1,876,400,810
18	TROWULAN	3.552,755,168	-152,498,979	3,400,256,189	2,569,900,554	18,277,740	2,588,178,294	2,569,900,554	18,277,740	2,588,178,294
	TOTAL	50,708,499,239	-3,007,669,130	47,700,830,109	39,566,565,709	324,781,030	39,891,346,739	39,566,565,709	324,781,030	39,891,346,739

Gambar 2. Foto Data Penetapan Target dan Penerimaan/Realisasi PBB Tahun 2019

PERIODE PEMBAYARAN : 1-1-2020 Sampai 31-12-2020

NO	KECAMATAN	BAKU AWAL	PERUBAHAN	BAKU AKHIR	REALISASI PERIODE INI			REALISASI S/D PERIODE INI		
					POKOK	SANKSI	TOTAL	POKOK	SANKSI	TOTAL
1	GONDANG	1,646,100,959	-33,240,028	1,612,860,931	1,402,285,463	0	1,402,285,463	1,402,285,463	0	1,402,285,463
2	PUNGGING	3,757,975,653	-177,674,277	3,580,301,376	3,015,774,734	0	3,015,774,734	3,015,774,734	0	3,015,774,734
3	GEDEG	1,959,428,590	-140,600,534	1,818,828,056	1,519,661,864	0	1,519,661,864	1,519,661,864	0	1,519,661,864
4	MOJOSARI	3,846,535,908	-247,902,202	3,598,633,706	2,919,878,340	0	2,919,878,340	2,919,878,340	0	2,919,878,340
5	TRAWAS	2,647,970,906	-225,084,873	2,422,886,033	1,916,972,474	0	1,916,972,474	1,916,972,474	0	1,916,972,474
6	DAWARBLANDONG	2,660,655,854	-273,069,026	2,387,586,828	1,866,151,165	0	1,866,151,165	1,866,151,165	0	1,866,151,165
7	DLANGGU	2,521,055,078	-205,854,212	2,315,200,866	1,809,481,808	0	1,809,481,808	1,809,481,808	0	1,809,481,808
8	MOJOANYAR	2,186,664,191	-155,018,171	2,031,646,020	1,572,528,205	0	1,572,528,205	1,572,528,205	0	1,572,528,205
9	BANGSAL	2,078,960,412	-182,186,878	1,896,773,534	1,460,906,694	0	1,460,906,694	1,460,906,694	0	1,460,906,694
10	PACET	2,851,355,624	-386,033,443	2,465,322,181	1,858,406,467	0	1,858,406,467	1,858,406,467	0	1,858,406,467
11	JATIREJO	1,905,059,311	-251,970,750	1,653,088,561	1,207,545,638	0	1,207,545,638	1,207,545,638	0	1,207,545,638
12	NGORO	3,688,162,151	-325,673,619	3,362,488,532	2,422,593,647	0	2,422,593,647	2,422,593,647	0	2,422,593,647
13	KUTUREJO	2,206,651,559	-163,322,509	2,043,329,050	1,442,196,446	0	1,442,196,446	1,442,196,446	0	1,442,196,446
14	JETIS	3,637,286,323	-403,177,404	3,234,108,919	2,281,570,613	0	2,281,570,613	2,281,570,613	0	2,281,570,613
15	PURI	3,640,937,316	-405,584,527	3,235,352,789	2,242,740,446	0	2,242,740,446	2,242,740,446	0	2,242,740,446
16	TROWULAN	3,551,774,292	-245,109,744	3,306,664,548	2,286,027,708	0	2,286,027,708	2,286,027,708	0	2,286,027,708
17	SOOKO	3,419,639,369	-414,196,208	3,005,443,161	1,958,787,467	0	1,958,787,467	1,958,787,467	0	1,958,787,467
18	KEMLAGI	2,490,459,234	-352,730,340	2,137,728,894	1,377,186,689	0	1,377,186,689	1,377,186,689	0	1,377,186,689
	TOTAL	50,696,672,730	-4,588,428,745	46,108,243,985	34,560,695,868	0	34,560,695,868	34,560,695,868	0	34,560,695,868

Gambar 3. Foto Data Penetapan Target dan Penerimaan/Realisasi PBB Tahun 2020

PERIODE PEMBAYARAN : 1-1-2021 Sampai 31-12-2021

NO	KECAMATAN	BAKU AWAL	PERUBAHAN	BAKU AKHIR	REALISASI PERIODE INI			REALISASI S/D PERIODE INI		
					POKOK	SANKSI	TOTAL	POKOK	SANKSI	TOTAL
1	PUNGGING	3,863,905,943	-96,878,509	3,767,027,434	3,342,539,780	0	3,342,539,780	3,342,539,780	0	3,342,539,780
2	BANGSAL	2,121,810,956	-60,381,921	2,061,429,035	1,807,110,591	0	1,807,110,591	1,807,110,591	0	1,807,110,591
3	GONDANG	1,657,351,013	-99,073,843	1,558,277,170	1,355,225,558	0	1,355,225,558	1,355,225,558	0	1,355,225,558
4	DLANGGU	2,538,381,499	-99,093,087	2,439,288,412	1,963,426,564	0	1,963,426,564	1,963,426,564	0	1,963,426,564
5	PACET	2,882,697,633	-120,005,072	2,762,692,561	2,216,531,516	0	2,216,531,516	2,216,531,516	0	2,216,531,516
6	DAWARBLANDONG	2,696,184,079	-145,854,208	2,550,329,871	2,019,416,449	230	2,019,416,679	2,019,416,449	230	2,019,416,679
7	MOJOSARI	3,905,819,919	-221,106,246	3,684,713,673	2,890,560,357	0	2,890,560,357	2,890,560,357	0	2,890,560,357
8	MOJOANYAR	2,234,391,269	-83,953,343	2,150,437,926	1,686,476,127	0	1,686,476,127	1,686,476,127	0	1,686,476,127
9	TRAWAS	2,662,958,330	-111,185,064	2,551,773,266	1,996,539,914	0	1,996,539,914	1,997,351,040	0	1,997,351,040
10	JATIREJO	1,918,512,685	-108,031,653	1,810,481,032	1,404,417,908	0	1,404,417,908	1,404,456,530	0	1,404,456,530
11	GEDEG	1,998,230,806	-116,398,248	1,881,832,558	1,418,265,464	0	1,418,265,464	1,418,265,464	0	1,418,265,464
12	JETIS	3,691,051,427	-187,104,311	3,503,947,116	2,592,128,670	0	2,592,128,670	2,592,128,670	0	2,592,128,670
13	KUTUREJO	2,224,334,365	-103,666,135	2,120,668,230	1,550,177,598	0	1,550,177,598	1,550,249,022	0	1,550,249,022
14	TROWULAN	3,552,463,287	-106,723,308	3,445,739,979	2,485,670,133	0	2,485,670,133	2,485,670,133	0	2,485,670,133
15	NGORO	3,759,244,358	-250,292,614	3,508,951,744	2,399,441,393	27,715	2,399,469,108	2,399,441,393	27,715	2,399,469,108
16	PURI	3,764,239,321	-267,743,419	3,496,495,902	2,359,796,710	0	2,359,796,710	2,359,796,710	0	2,359,796,710
17	KEMLAGI	2,541,858,212	-135,806,633	2,406,051,579	1,603,697,980	0	1,603,697,980	1,603,697,980	0	1,603,697,980
18	SOOKO	3,504,927,684	-259,463,592	3,245,464,092	2,040,333,199	0	2,040,333,199	2,040,343,199	0	2,040,343,199
	TOTAL	51,518,362,786	-2,572,761,206	48,945,601,580	37,131,755,911	27,945	37,131,783,856	37,132,687,083	27,945	37,132,715,028

Gambar 4. Foto Data Penetapan Target dan Penerimaan/Realisasi PBB Tahun 2021

PERIODE PEMBAYARAN : 1-1-2020 Sampai 31-12-2020

NO	KECAMATAN	BAKU AWAL	PERUBAHAN	BAKU AKHIR	REALISASI PERIODE INI			REALISASI S/D PERIODE INI		
					POKOK	SANKSI	TOTAL	POKOK	SANKSI	TOTAL
1	GONDANG	1,646,100,959	-33,240,028	1,612,860,931	1,402,285,463	0	1,402,285,463	1,402,285,463	0	1,402,285,463
2	PUNGGING	3,757,975,653	-177,674,277	3,580,301,376	3,015,774,734	0	3,015,774,734	3,015,774,734	0	3,015,774,734
3	GEDEG	1,959,428,590	-140,600,534	1,818,828,056	1,519,661,864	0	1,519,661,864	1,519,661,864	0	1,519,661,864
4	MOJOSARI	3,846,535,908	-247,902,202	3,598,633,706	2,919,878,340	0	2,919,878,340	2,919,878,340	0	2,919,878,340
5	TRAWAS	2,647,970,906	-225,084,873	2,422,886,033	1,916,972,474	0	1,916,972,474	1,916,972,474	0	1,916,972,474
6	DAWARBLANDONG	2,660,655,854	-273,069,026	2,387,586,828	1,866,151,165	0	1,866,151,165	1,866,151,165	0	1,866,151,165
7	DLANGGU	2,521,055,078	-205,854,212	2,315,200,866	1,809,481,808	0	1,809,481,808	1,809,481,808	0	1,809,481,808
8	MOJOANYAR	2,186,664,191	-155,018,171	2,031,646,020	1,572,528,205	0	1,572,528,205	1,572,528,205	0	1,572,528,205
9	BANGSAL	2,078,960,412	-182,186,878	1,896,773,534	1,460,906,694	0	1,460,906,694	1,460,906,694	0	1,460,906,694
10	PACET	2,851,355,624	-386,033,443	2,465,322,181	1,858,406,467	0	1,858,406,467	1,858,406,467	0	1,858,406,467
11	JATIREJO	1,905,059,311	-251,970,750	1,653,088,561	1,207,545,638	0	1,207,545,638	1,207,545,638	0	1,207,545,638
12	NGORO	3,688,162,151	-325,673,619	3,362,488,532	2,422,593,647	0	2,422,593,647	2,422,593,647	0	2,422,593,647
13	KUTOREJO	2,206,651,559	-163,322,509	2,043,329,050	1,442,196,446	0	1,442,196,446	1,442,196,446	0	1,442,196,446
14	JETIS	3,637,286,323	-403,177,404	3,234,108,919	2,281,570,613	0	2,281,570,613	2,281,570,613	0	2,281,570,613
15	PURI	3,640,937,316	-405,584,527	3,235,352,789	2,242,740,446	0	2,242,740,446	2,242,740,446	0	2,242,740,446
16	TROWULAN	3,551,774,292	-245,109,744	3,306,664,548	2,286,027,708	0	2,286,027,708	2,286,027,708	0	2,286,027,708
17	SOOKO	3,419,639,369	-414,196,208	3,005,443,161	1,958,787,467	0	1,958,787,467	1,958,787,467	0	1,958,787,467
18	KEMLAGI	2,490,459,234	-352,730,340	2,137,728,894	1,377,186,689	0	1,377,186,689	1,377,186,689	0	1,377,186,689
	TOTAL	50,696,672,730	-4,588,428,745	46,108,243,985	34,560,695,868	0	34,560,695,868	34,560,695,868	0	34,560,695,868

Gambar 5. Foto Data Penetapan Target dan Penerimaan/Realisasi PBB Tahun 2022

Tabel 3. Rekapitulasi Target dan Realisasi PBB

NO	TAHUN	TARGET			REALISASI		
		BAKU AWAL	PERUBAHAN	BAKU AKHIR	POKOK	SANKSI	TOTAL
1	2018	50,271,281,327	-2,412,535,241	47,858,746,086	40,843,361,201	391,564,068	41,234,925,269
2	2019	50,708,499,239	-3,007,669,130	47,700,830,109	39,566,565,709	324,781,030	39,891,346,739
3	2020	50,696,672,730	-4,588,428,745	46,108,243,985	34,560,695,868	0	34,560,695,868
4	2021	51,518,362,786	-2,572,761,206	48,945,601,580	37,132,687,083	27,945	37,132,715,028
5	2022	51,324,269,688	21,575,621	51,345,845,309	37,824,959,796	70,013,804	37,894,973,600

Sumber: Daftar Setoran Penerimaan PBB P2 Buku 123 Tahun Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022

Dari tabel 3 diatas dapat dihitung efektifitasnya dengan menggunakan rumus $\frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$

Hasil perhitungan tersebut tersaji dalam tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Efektifitas Penerimaan PBB

NO	TAHUN	EFEKTIFITAS	KRITERIA
1	2018	86.16%	Cukup Efektif
2	2019	83.63%	Cukup Efektif
3	2020	74.96%	Kurang Efektif
4	2021	75.87%	Kurang Efektif
5	2022	73.80%	Kurang Efektif

Sumber: data diolah peneliti: 2022

Sebagaimana data yang tersaji diketahui bahwa pada masa sebelum pandemi efektifitas pemungutan pajak atas bumi dan juga bangunan di Kabupaten Mojokerto pada kriteria cukup efektif (tahun 2018 dan 2019) sedangkan pada masa pandemi Kurang Efektif (tahun 2020-2022). Hal ini disebabkan adanya perubahan target capaian sebagaimana dalam tabel 3. Pada tahun 2018 target capaiannya sebesar Rp. 47,858,746,086 dan pada tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 0,33% atau sebesar Rp. 157,915,977 dari tahun 2018. Pada tahun 2020 target terkontraksi lagi sebesar 3,34% atau sebesar Rp. 1,592,586,124 dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 terjadi ekspansi atas target sebesar 6.15% atau Rp. 2,837,357,595 dari tahun 2020. Dan pada tahun 2022 terjadi ekspansi lagi sebesar 4.90% atau Rp. 2,400,243,729 dari tahun 2021. Adanya ekspansi atas target capaian pada masa pandemi ternyata tidak diimbangi dengan ekspansi pada realisasi penerimaan pajak atas bumi dan juga bangunan, malahan terjadi kontraksi atas realisasi penerimaan.

SIMPULAN

Pembayaran pajak atas bumi dan juga bangunan Kabupaten Mojokerto dapat dilakukan secara online maupun offline. Pemungutan pajak atas bumi dan juga bangunan di Kabupaten Mojokerto dipungut langsung oleh petugas dari badan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto dan sampai saat ini masih melibatkan aparatur pemerintahan desa. Pada masa sebelum pandemi efektifitas pemungutan pajak atas bumi dan juga bangunan di Kabupaten Mojokerto dalam kriteria cukup efektif (tahun 2018 dan 2019) sedangkan pada masa pandemi kurang efektif (tahun 2020-2022). Hal ini disebabkan adanya perubahan target capaian yang dibarengi pula dengan penurunan realisasi penerimaan pajak atas bumi dan juga bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bela Kusuma Wardani dan Sri Dwi Estiningrum, 2021. Keberhasilan Pemungutan Pajak atas bumi dan juga bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Trenggalek. JAP : Vol. 23, No. 1, Februari 2022 - Juli 2022. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/5519/pdf>.
- Cantika Adinda Putri, 2021. Membedah Setoran Pajak Saat Pandemi: Dari -19% Sampai Positif. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210727140757-4-264004/membedah-setoran-pajak-saat-pandemi-dari-19-sampai-positif>.
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media. <https://nasional.tempo.co/read/1566720/2-tahun-pandemi-covid-19-ringkasan-perjalanan-wabah-corona-di-indonesia>.
- Ibnu Fajar Ramadhan, 2021. Efektivitas Pemungutan Pajak atas bumi dan juga bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Diakses dari: <http://eprints.ipdn.ac.id/6324/1/IBNU%20FAJAR%20RAMADHAN%2028.0114%20EFEKTIVITAS%20PEMUNGUTAN%20PAJAK%20BUMI%20DAN%20BANGUNAN%20PERDESAAN%20DAN%20PERKOTAAN%20%28PBB-P2%29%20PADA%20MASA%20PANDEMI%20COVID-19%20DI%20KOTA%20MEDAN%20PROVINSI%20SUMATERA%20UTARA%20.docx.pdf>.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327, (1996)
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Safitri, P. A. R., Wicaksono, G., & Kusumaningrum, N. D. 2022. Effectiveness Analysis of the Land and Building Tax of Rural and Urban Areas (PBB-P2) Contribution to Local OwnSource Revenue (PAD) of Tuban Regency. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(1), 7–13.
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan Indonesia, Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Nomor 5049. Jakarta